

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anatami, Darwis. (2021). *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ginting, Elyta Ras. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2019). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, Djaja S. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Banda dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2015). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekti. (1996) *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Jakarta: Intermasa.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. (2018). *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Zoelfirman. (2003). *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia (Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*. Medan: UISU Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblads* Tahun 1874 Nomor 23).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. LAIN-LAIN

Aditya, Tjokorda Agung Candra. (2021). “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(3), 1549-1554.

Nisa, Cholifatun. (2019). “Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas”, *Jurist-Diction*, 2(2).

Sinaga, Niru Anita dan Nurlily Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, 43.

Wawancara bersama dengan Benny Wahyu Sujatmiko, S.H., M.H. selaku kurator dan pengurus swasta yang tergabung dalam Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) pada tanggal 15 Oktober 2022 di Sidoarjo.

Wawancara dengan Fitriyah Khadijah, S.H., M.H. selaku Staff Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus, Pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bapak Gunawan Tri Budiono, S.H.,M.H selaku Hakim Senior Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus, Pada Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022.